

## Evaluasi Sistem Distribusi dan Tingkat Bunga Beban Gaduhan Ternak Sapi Bibit Provinsi Jambi

Ardi Novra<sup>1</sup> dan Bagus Pramusintho<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Peternakan Universitas Jambi  
Jl. Jambi-Muara Bulian KM 14, Mendalo, Jambi

### Intisari

Penelitian bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi ternak sapi bibit sebagai dasar bagi pengembangan kapaistas kelembagaan peternak sapi potong. Penelitian survey dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan dengan unit analisis adalah rumah tangga peternak (RTP) sapi potong penerima guliran ternak sapi bibit. Pengumpulan data menggunakan teknik penarikan sampling acak kelompok multi tahap (*multy-stage cluster random sampling*) pada 3 (tiga) wilayah kabupaten yang mewakili wilayah barat, tengah dan timur Provinsi Jambi. Metode analisis data menggunakan metode perhitungan bunga majemuk (*compound interest*) dan model persamaan struktural dengan 3 persamaan perilaku mencakup 3 variabel endogen dan 6 eksogen. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa tingkat bunga beban ditanggung RTP penerima gaduhan sistem 1 kembali 2 mencapai 23,65% yang jauh lebih tinggi dibanding dengan sistem grati (6,60%), sistem 1 kembali 1 (4,39%) dan bahkan tingkat suku bunga investasi dan modal yang sedang berlaku. Hasil evaluasi terhadap sistem distribusi ternak sapi bibit menunjukkan bahwa jangka waktu penarikan pertama tidak berbeda antar berbagai sistem gaduhan yaitu rata-rata > 30 bulan setelah ternak diterima, tingkat pelunasan ternak sapi bibit relatif sangat rendah dan bahkan diperkirakan melampaui batas waktu kontrak pelunasan yang signifikan dipengaruhi sistem gaduhan, jangka waktu pengembalian pertama dan jangka waktu gaduhan berjalan. Tingkat bunga beban ditanggung RTP berbeda signifikan antara sistem gaduhan dan dipengaruhi oleh jangka waktu pengembalian. Berdasarkan pada hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakadilan antar berbagai sistem gaduhan dan bahkan tidak adanya insentif bagi RTP yang mampu mengembalikan lebih cepat akan mengurangi motivasi RTP untuk mempercepat pengembalian melalui akselerasi produktivitas ternak sapi yang dipelihara.

*Kata kunci: evaluasi, sistem, distribusi, sapi dan bibit.*

### Abstract

The research objective to evaluating of the heifer distribution system which's can be using as a base of the capacity building program of the farmer institution empowerment. The research survey doing 8 (eights) month which's unit analysis is the livestock farmer households who's receive the meat cow on the breeding program. Data collected by *multi-stage cluster random sampling* at the three regencies which's representative of the three regions of Jambi Province were west, middle and east. Data analyzed using the *compound interest* and structural equation model with threes equation behavior divide 3 endogenous and 6 exogenous variable. The result of the research can be indicated that the interest rate of the 1 : 2 system was 22,65% and this rate more than higher from Grati system (6,60%), 1 : 1 system (4,39%) and so commercial credit investment. The evaluation of the distribution system show that the long time to first restore cattle are not different among the system rotate (average > 30 months), the level of restored is lowest and predicted will be more length than contract period (60 months). This level of restored significantly influenced by the share cropping system, the first of restored period, and the running of shared cropping period. The interest rate of which's must be pay by households different significantly among the share cropping system and will be significantly effected by the time period of the restored. Based on the result and discussion will be conclude that not only unfair among the share

cropping system but on the same system too. Nothing incentive as a reward of the fast of restored will be decreasing the household livestock motivation to effort to acceleration of their heifer productivities.

*Key words: evaluation, system, distribution, cattle and breeding*

### **Pendahuluan**

Pada masa yang akan datang cara pandang peternak sebagai budidaya perlu diperluas menjadi industri biologis yang meliputi 4 aspek yaitu peternak sebagai subyek yang harus ditingkatkan pendapatan (kesejahteraannya), ternak sebagai obyek yang harus ditingkatkan produksi dan produktivitasnya, lahan sebagai basis ekologi budidaya yang harus dilestarikan, dan teknologi dan pengetahuan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi selalu diperbaharui sesuai kebutuhan (Pambudy dkk, 1995). Pembangunan perdesaan khususnya peternakan harus dimulai dari tempat pertanian itu berada, yaitu manusia sebagai pelaku sekaligus tujuan, dan kelembagaan sebagai motor penggerak perilaku (*entities*) (Ramelan, 1997). Untuk mencapai hal tersebut perlu dikembangkan suatu sistem agribisnis yang mencakup 4 sub-sistem, yaitu sub-sistem budidaya (*production*), pengadaan sapronak (*input factors*), industri pengolahan (*processing*), pemasaran (*marketing*), dan kelembagaan penunjang (*supporting institution*) (Saragih dan Krisnamurthi, 1992). Partisipasi masyarakat (kelompok) dalam penyelesaian masalah dibutuhkan karena mampu menguatkan rasa tanggung jawab, menunjang efisiensi, menjamin keberhasilan pembangunan, dan membantu proses pelaksanaan teknis program (Kumorotomo, 2007).

Sistem distribusi ternak sapi di Provinsi Jambi bervariasi yang menunjukkan bahwa belum adanya standar baku sistem distribusi ternak sapi bibit yang berkelanjutan. Selama ini

sistem distribusi ternak sapi bibit mengacu SK. Mentan No. 146/Kpts/HK.050/2/93 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah yaitu 1 kembali 2. Pada tahun 2009 melalui Peraturan Gubernur dilakukan modifikasi sistem distribusi dengan menggunakan pendekatan sistem perguliran induk atau yang dikenal dengan sistem Grati. Pada sistem peternak penggaduh setelah mendapatkan anak dan berumur 1 tahun maka induk ditarik kembali untuk disistribusikan pada rumah tangga lain. Pada program lain yang dilakukan oleh pihak swasta melalui dana CSR (Coorporate Social Responsibility) menggunakan sistem 1 kembali 1, sedangkan pada ternak bibit gaduhan pemerintah kabupaten (APBD Kabupaten) tetap menggunakan pola 1 kembali 2 (Novra dan Depison, 2010).

Pada tahun 2006 diluncurkan Program Aksi Perbibitan melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) sumber dana APBN berbentuk hibah dan tidak wajib dikembalikan. Pola gaduhan dalam kelompok program tergantung kesepakatan dan hasil evaluasi menunjukkan bahwa a) pada sistem 1 kembali 1 lebih menguntungkan peternak penggaduh dan dapat mempercepat perkembangan skala usaha rumah tangga tetapi tidak mampu mendorong penguatan kapasitas modal kelompok, b) sistem kembali tunai plus jasa yang menguntungkan penggaduh tetapi pada sisi lain memiliki kelemahan bahwa perkembangan skala usaha dan kelompok berjalan lambat dan bahkan stagnan karena jasa pinjaman hanya mampu menutupi kenaikan harga

ternak bibit dan anak hasil gaduhan cenderung dijual dan tidak dibelikan kembali ternak sapi bibit, dan c) pada sistem 1 kembali 2 meskipun berat bagi anggota kelompok tetapi pada sisi lain surplus pengembalian ternak mendorong perkembangan asset ternak dan permodalan kelompok (Novra dkk., 2009).

Pada masa akan datang perlu suatu sistem distribusi yang tidak hanya mampu mengurangi beban pengembalian oleh rumah tangga kepada pemerintah tetapi juga mampu memperluas distribusi rumah tangga penggaduh serta mampu memperkuat kapasitas kelompok dalam melakukan penanganan dini pengurusan sapi betina produktif. Berdasarkan kepada hal tersebut maka dilakukan penelitian tentang sistem distribusi ternak sapi bibit sebagai langkah awal dalam upaya pemberdayaan anggota dan kelompok peternak sapi potong.

### Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode survey selama 8 (delapan) bulan mulai Mei sampai November 2012 pada 3 (tiga) kabupaten yang mewakili wilayah barat, tengah dan timur Provinsi Jambi. Jenis dan sumber data dalam penelitian terdiri dari data primer yang dikumpulkan secara langsung dari rumah tangga peternak (RTP) melalui pendekatan partisipatif menggunakan kuisioner dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh langsung dari berbagai lembaga terkait. Teknik penarikan RTP sebagai unti analisis menggunakan teknik sampling acak kelompok multi tahap (*Multistage Cluster Random Sampling*). Penentuan beban bunga ditanggung peternak menggunakan pendekatan matematika keuangan metode perhitungan bunga majemuk (*compound interest*) sebagai berikut (Frensidy, 2006).

$$i = \left( \frac{S}{P} \right)^{\frac{1}{n}} - 1$$

dimana:

- i = beban bunga yang ditanggung peternak penggaduh (%)
- S = nilai pengembalian ternak sapi bibit (rupiah)
- P = nilai awal ternak sapi bibit diterima (rupiah)
- n = jangka waktu pengembalian (bulan)

Model persamaan struktural terdiri dari 3 persamaan perilaku dengan 3 endogen

dan 6 variabel eksogen sebagai berikut:

$$PKEMP = \alpha_1 + \beta_{1.1}UTER + \beta_{1.2}SKIN + \beta_{1.3}JTER + e_1 \quad (1)$$

$$TLNS = \alpha_2 + \beta_{2.1}PKEMP + \beta_{2.2}SDUA + \beta_{2.3}SKIN + \beta_{2.4}LGAD + \beta_{2.5}JTER + e_2 \quad (2)$$

$$INTRY = \alpha_3 + \beta_{3.1}PKEMA + \beta_{3.2}JTER + \beta_{3.3}TLNS + \beta_{3.4}SDUA + \beta_{3.5}SKIN + e_3 \quad (3)$$

Keterangan:

PKEMP = Jangka waktu pengembalian pertama (bulan)

TLNS = Tingkat pelunasan (%)

INTRY = Beban bunga yang ditanggung peternak penerima gaduhan (%)

UTER = Umur ternak sapi bibit diterima (bulan)

- JTER = Jumlah ternak sapi bibit diterima (ekor)  
PKEMA= Jangka waktu pengembalian pertama (bulan)  
LGAD = Lama gaduhan yang sudah berjalan (bulan)  
SKIN = Dummy sistem pengembalian (1 kembali induk dan 0 kembali anak)  
SDUA = Dummy tingkat kembalian (1 untuk kembali 2 dan 0 untuk kembali 1)  
 $\alpha_i$  = intersept  
 $\beta_i$  = koefisien regresi  
e = error term

Analisis data menggunakan software SAS-ETS 6.12 dan uji hasil estimasi model secara bersama-sama menggunakan uji F dan secara parsial atau individu menggunakan uji t.

## Hasil dan Pembahasan

### *Ketepatan Rumah Tangga Sasaran Distribusi Ternak Sapi Bibit*

Gambaran umum rumah tangga dan kelembagaan dapat dijadikan sebagai inidkator dalam menentukan ketepatan sasaran distribusi ternak sapi bibit yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Mayoritas (85,33%) rumah tangga sasaran distribusi ternak sapi bibit adalah rumah tangga berpendidikan rendah dan menengah (setara SD dan SLTP) serta sebagian lainnya berpendidikan cukup tinggi yaitu setara SLTA. Komposisi tingkat pendidikan ini mengindikasikan bahwa penyebaran sapi potong bibit diarahkan untuk masyarakat golongan bawah sampai menengah pada wilayah perdesaan dengan pekerjaan utama sebagai petani atau terkait dengan sektor pertanian. Salah satu indikator ketepatan sasaran adalah tidak adanya kelompok rumah tangga dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri baik PNS maupun ABRI serta rendahnya

proporsi karyawan swasta yang menerima ternak sapi bibit.

Umumnya penerima sapi bibit gaduhan adalah kelompok rumah tangga dengan pekerjaan utama non-formal dengan mayoritas adalah para petani baik petani pemilik lahan maupun penggarap serta pekerja sektor pertanian (buruh tani). Sekitar 84% rumah tangga target adalah rumah tangga pertanian terutama pada dua kabupaten (Sarolangun dan Tanjab Timur), dan khusus untuk Kabupaten Muaro Jambi karena sebagian daerah merupakan kawasan sub-urban Kota Jambi sehingga proporsi rumah tangga non-pertanian cukup besar (32%). Pada wilayah sub-urban ini sektor pertanian tidak selalu menjadi pekerjaan utama tetapi menjadi pekerjaan sampingan akibat terbatasnya penguasaan lahan budidaya atau usahatani rumah tangga, seperti disajikan pada Tabel 1. Rataan penguasaan lahan usahatani rumah tangga peternak sasaran target distribusi ternak sapi potong bibit di Kabupaten Muaro Jambi tergolong paling rendah (0,48 Ha) atau lebih dikenal sebagai petani lahan kecil. Keterbatasan lahan menyebabkan sebagian rumah tangga tidak menjadikan sektor pertanian sebagai pekerjaan utama dan hanya berperan sebagai sumber pendapatan tambahan (pekerjaan sampingan).

Tabel 1. Penguasaan Lahan Pertanian Rumah Tangga Sasaran Distribusi Ternak Sapi Potong Bibit (Ha)

No	Kabupaten	Perkebunan			Pangan		Tidak Diolah	Jumlah
		Karet	Sawit	Lain	Sawah	Kering		
1	Sarolangun	0,68	1,77	0,02	0,06	-	-	2,53
2	Muaro Jambi	0,22	0,07	-	0,10	0,00	0,09	0,48
3	Tanjab Timur	0,17	2,38	0,02	-	-	0,04	2,60
	Jumlah	0,35	1,40	0,01	0,05	0,00	0,04	1,87

Sumber: Olahan data primer (2012)

Penggunaan lahan usahatani rumah tangga terbesar adalah untuk budidaya perkebunan kelapa sawit terutama pada Kabupaten Sarolangun dan Muaro Jambi. Sasaran distribusi ternak sapi bibit pada rumah tangga kelapa sawit tidak terlepas dari program prioritas pengembangan usaha ternak sapi potong melalui pendekatan integrasi sawit sapi Provinsi Jambi. Secara konseptual integrasi merupakan suatu upaya dalam memanfaatkan potensi sumberdaya pada suatu usahatani untuk mendukung pengembangan usahatani lainnya. Sebagai contoh dalam integrasi sawit sapi, sumberdaya pakan baik berupa Hijauan Antar Tanaman (HAT) dan limbah perkebunan untuk mendukung ketersediaan kebutuhan pakan ternak dan sebaliknya limbah kandang usaha ternak seperti feses dan urine sebagai sumber pupuk organik pengganti pupuk kimia bagi usaha tani perkebunan sawit.

Distribusi ternak bibit oleh pemerintah dan lembaga lainnya tidak dilakukan secara individual tetapi secara melembaga sehingga setiap rumah tangga sasaran sebelum menerima guliran ternak sapi bibit harus terdaftar sebagai anggota kelompok. Kebijakan distribusi sapi ternak sapi bibit melalui

kelompok sudah berjalan dengan baik meskipun pada beberapa kasus masih ada rumah tangga yang menerima ternak sapi gaduhan tanpa memenuhi syarat sebagai anggota kelompok. Pada sisi lain ada kesan bahwa kelembagaan kelompok tani tidak diikuti dengan perluasan peran dan fungsi kelompok menjadi lembaga ekonomi seperti dalam bentuk koperasi. Hal ini terlihat dari rendahnya keterlibatan anggota kelompok tani sebagai anggota koperasi dan menjadi indikasi kurang berkembangnya kelompok atau proses pemberdayaan kurang diperhatikan. Beberapa hal yang diduga menjadi faktor penyebab adalah kurangnya insentif yang diterima kelompok guna mengembangkan diri menjadi lembaga yang memiliki multi fungsi seperti koperasi atau bentuk lembaga ekonomi lainnya seperti lembaga keuangan mikro.

Pada sisi lain pengalaman dalam beternak sapi tidak menjadi prasyarat utama bagi rumah tangga sasaran untuk menerima gaduhan sapi bibit dari pemerintah atau pihak lainnya. Kondisi ini terlihat dari komposisi pengalaman dan skala kepemilikan usaha ternak sapi rumah tangga sasaran penerima distribusi ternak sapi bibit (Tabel 2).

Tabel 2. Kepemilikan dan Pengalaman Rumah Tangga Sasaran Penerima Distribusi Ternak Sapi Potong Bibit

No	Pengalaman Sebelum Menerima Gaduhan	Kabupaten			Rataan
		Sarolangun	Ma. Jambi	Tanjabtim	
1	Kepemilikan ternak sapi				
	a. RT memiliki ternak sapi (%)	16,00	16,00	20,51	17,50
	b. RT tidak memiliki ternak sapi (%)	84,00	84,00	79,49	82,50
2	Lama beternak sebelumnya (Tahun)	2,54	1,00	1,00	1,64
3	Skala Kepemilikan (UT)	1,72	2,13	2,44	2,09

Sumber: Olahan data primer (2012)

Sebagian besar rumah tangga penerima ternak sapi bibit gaduhan yang didistribusikan oleh pemerintah maupun pihak lainnya tidak memiliki ternak sapi atau pengalaman sebelumnya. Hanya sebagian kecil rumah tangga yang telah memiliki pengalaman tetapi tetap dengan rata-rata pengalaman yang rendah dengan rata-rata pengalaman hanya sekitar 1,64 tahun dan skala kepemilikan rumah tangga relatif masih rendah yaitu 2,09 UT. Pola distribusi ternak seperti ini mengindikasikan beberapa hal, antara

lain bahwa orientasi pengembangan usaha peternakan sapi potong lebih pada pengembangan usaha baru bagi rumah tangga melalui bantuan modal dalam bentuk ternak sapi bibit dibanding pada pengembangan skala usaha ternak sapi rumah tangga yang sudah ada. Faktor ini diduga menjadi penyebab kurang berkembangnya usaha ternak sapi dengan skala ekonomi memadai ( $\pm 10$  ekor), atau yang berkembang adalah usaha ternak sapi skala kecil ( $\leq 3$  ekor) seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Skala Kepemilikan Usaha Ternak Sapi Rumah Tangga Sasaran Penerima Distribusi Ternak Sapi Bibit

No	Kabupaten	Skala Usaha		Proporsi Skala Usaha (%)		
		ekor	UT	$\leq 3$ ekor	3 - 5 ekor	$\geq 6$ ekor
1	Sarolangun	4,26	3,18	42,00	46,00	12,00
2	Muaro Jambi	2,32	1,76	90,00	4,00	6,00
3	Tanjab Timur	4,04	2,83	36,00	48,00	16,00
	Rataan	3,54	2,59	56,00	32,67	11,33

Sumber: Olahan data primer (2012)

Mayoritas skala usaha ternak rumah tangga relatif kecil ( $\leq 3$  ekor) dan sebaliknya proporsi yang sudah mencapai skala ekonomi relatif rendah sehingga mayoritas usaha dapat dikatakan sebagai sambila. Peningkatan

skala usaha setelah mendapatkan gaduhan ternak sapi juga relatif rendah kecuali untuk wilayah Kabupaten Sarolangun yang mencapai 29,32%/tahun (Tabel 4).

Tabel 4. Perkembangan Skala Kepemilikan Ternak Sapi Rumah Tangga Sasaran Penerima Distribusi Ternak Sapi Bibit

No	Uraian	Kabupaten			Rataan
		Sarolangun	Muaro Jambi	Tanjab Timur	
1	Skala awal (UT)	1,72	2,13	2,44	2,09
2	Skala saat penelitian (UT)	3,18	1,76	2,83	2,59
3	Gaduhan diterima (ekor)	2,29	1,12	1,90	1,77
4	Lama beternak (tahun)	4,14	4,48	3,60	4,07
5	Lama menggaduh	2,90	3,58	3,60	3,36
6	Pertambahan (UT/tahun)	0,50	-0,10	0,11	0,15
7	Pertumbuhan (%/tahun)	29,32	-4,80	4,47	7,05

Sumber: Olahan data primer (2012)

Perkembangan skala kepemilikan ternak sapi pada wilayah lainnya relatif rendah dan bahkan di Kabupaten Muaro Jambi terjadi pertumbuhan negatif yang mengindikasikan semakin menurunnya skala usaha ternak sapi rumah tangga. Tujuan gaduhan yang sebagian besar untuk usaha penggemukan diduga menjadi faktor penyebab utama karena ternak sapi tidak ditahan lama dalam rumah tangga. Hal ini mengindikasikan bahwa bagian hasil yang diterima rumah tangga dari usaha penggemukan tidak banyak digunakan untuk pengembangan usaha dan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Pada sisi lain, pertumbuhan skala yang rendah pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena sebagian besar masih merupakan peternak baru yang sebelumnya belum pernah memelihara ternak sapi potong. Pertumbuhan skala usaha ternak sapi ini akan semakin rendah jika dilakukan identifikasi lebih mendalam tentang kepemilikan riil ternak sapi dalam rumah tangga karena sebagian masih merupakan milik pemberi gaduhan terutama pemerintah (ternak gaduhan yang belum dikembalikan). Rendahnya dorongan sistem distribusi ternak sapi untuk peningkatan skala usaha disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sistem distribusi ternak sapi bibit yang tidak memberikan insentif dan bahkan memberatkan bagi peternak

penerima atau karena masih tingginya pengurusan sapi betina produktif.

Distribusi ternak sapi bibit dapat diklasifikasikan atas 3 (tiga) kelompok sistem gaduhan yang digunakan yaitu; a) Sistem kembali induk atau lebih dikenal dengan sistem Grati (peternak penggaduh mengembalikan induk diterima setelah mendapatkan anak dan sampai umur tertentu induk ditarik untuk didistribusikan), b) sistem 1 kembali 1 (peternak penggaduh mengembalikan 1 ekor sapi sesuai syarat ditentukan dan induk menjadi hak peternak penggaduh) dan c) sistem 1 kembali 2 (peternak penggaduh mengembalikan 2 ekor sapi sesuai syarat ditentukan dan induk menjadi hak peternak penggaduh). Pada dasarnya terdapat 2 sistem lainnya yang juga berkembang yaitu sistem gaduhan tunai dimana peternak penggaduh diwajibkan mengembalikan ternak sapi dengan uang tunai sesuai dengan nilai ternak sapi saat di gaduhan dan ditambah dengan bunga tertentu, serta sistem Grati yang dimodifikasi dimana induk ditarik untuk redistribusi jika peternak penerima pertama sudah menghasilkan 2 ekor anak sapi. Setiap sistem gaduhan yang dikembangkan memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri tergantung dari sudut pandang masing-masing. Sistem 1 kembali 1 sangat menguntungkan bagi peternak penggaduh karena nilai ternak yang

diterima lebih besar dari yang dibayarkan, sebaliknya sistem 1 kembali 2 sangat memberatkan peternak penggaduh karena nilai ternak yang diterima relatif lebih kecil dibanding nilai yang diterima. Kondisi dan perkembangan masing-masing sistem gaduhan ternak sapi bibit yang berkembang di Provinsi Jambi (Tabel 5).

Sistem gaduhan 1 kembali 2 yang didasarkan dari SK. Dirjen Peternakan sudah berkembang lama, sehingga proporsinya terbesar dibanding sistem gaduhan lainnya. Sistem ini biasanya diberlakukan untuk ternak sapi bibit gaduhan pemerintah sumber dana APBN atau APBD I, sedangkan untuk sumber dana APBD II secara perlahan sudah menggunakan sistem 1 kembali 1

dengan tujuan untuk lebih memotivasi peternak. Kedua sistem menjadikan anak dari sapi gaduhan sebagai pelunasan untuk didistribusi, sedangkan pada sistem Grati penarikan induk setelah anak sapi mencapai persyaratan tertentu sebagai kriteria pelunasan untuk didistribusi kepada peternak lainnya. Sistem ini sudah mulai dikembangkan dalam distribusi yang disebar oleh pihak swasta seperti yang diberlakukan pada program CSR Petrochina Ltd, sedangkan untuk sistem Grati modifikasi sesuai dengan SK. Gubernur Jambi baru dilakukan 1 atau 2 tahun terakhir sehingga belum dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi sistem distribusi.

Tabel 5. Perkembangan Distribusi Ternak Sapi Bibit Pada Masing-masing Sistem Gaduhan

No	Indikator	Sistem Gaduhan			Jumlah/ Rataan
		Grati	1 ; 1	1 ; 2	
1	Rumah Tangga Penggaduh				
	a. Jumlah RTP	24,00	48,00	78,00	150,00
	b. Proporsi (%)	16,00	32,00	52,00	100,00
2	RTP Sudah Mengembalikan				
	a. Jumlah RTP	21,00	12,00	29,00	62,00
	b. Proporsi (%)	87,50	25,00	37,18	49,89
	c. Waktu pengembalian pertama	30,38	32,08	33,66	32,04
3	RTP yang sudah melunasi				
	a. Jumlah RTP	2,00	9,00	1,00	12,00
	b. Proporsi Lunas (%)	8,33	18,75	1,28	8,00
	c. Jangka waktu pelunasan (bulan)	38,00	33,11	41,00	37,37
4	Lama penggaduhan (bulan)	30,88	36,54	39,19	35,54
5	Jumlah ternak sapi bibit diterima	2,00	1,96	2,15	1,70

Keterangan: Angka miring menunjukkan jangka waktu potensial

Sumber: Olahan data primer (2012)

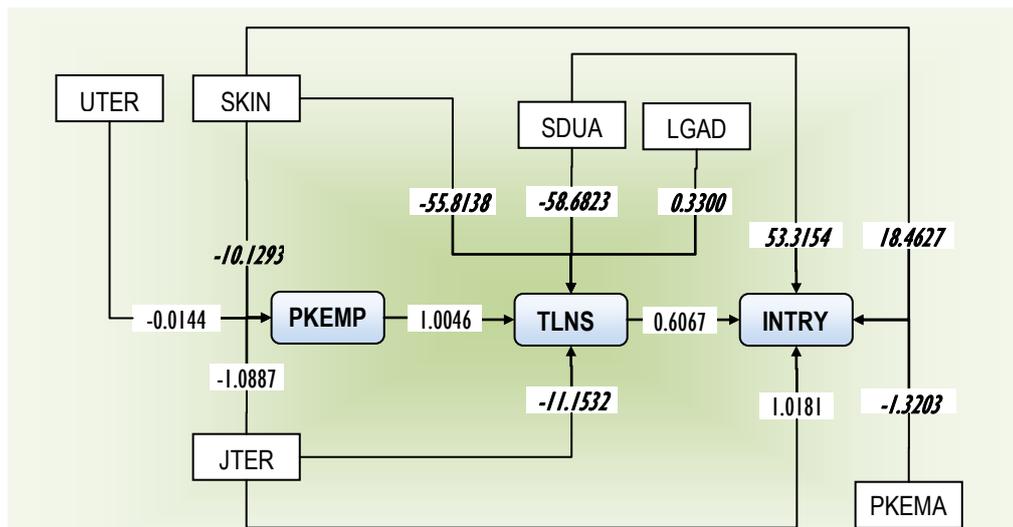
### *Evaluasi Sistem Distribusi dan Bunga Modal*

Sistem distribusi ternak sapi yang dikembangkan seperti sebelumnya dapat dikelompokkan atas 3 kelompok yaitu sistem kembali induk (grati), dan sistem kembali anak dengan pola 1 kembali 2 dan 1 kembali 1. Evaluasi

terhadap sistem distribusi ternak terdiri dari jangka waktu dibutuhkan untuk pengembalian pertama, tingkat pelunasan dan tingkat bunga modal yang ditanggung oleh rumah tangga penerima ternak sapi bibit gaduhan, seperti disajikan pada Gambar 1. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian pertama (penarikan oleh

pemberi gaduhan baik pemerintah maupun swasta) secara signifikan dipengaruhi oleh sistem gaduhan yang diterapkan. Sistem gaduhan kembali induk (grati) membutuhkan waktu yang lebih cepat dibanding dengan sistem kembali anak dengan perbedaan lama pengembalian pertama antara kedua sistem rata-rata lebih dari 10 bulan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem kembali induk mampu merangsang RTP untuk berusaha lebih intensif untuk sesegera mungkin memiliki sapi keturunan bibit (induk). Pada saat anak sapi berumur sekitar 18 bulan akan segera menjadi milik RTP pasca penarikan sapi bibit untuk kembali didistribusikan (redistribusi) kepada peternak lain oleh pemberi

gaduhan. Sapi bibit (induk) hanya menjadi milik sementara bagi RTP (hak kelola) sehingga motivasi untuk segera memiliki sapi sendiri akan mendorong RTP untuk berusaha sesegera mungkin mengembalikan sapi bibit yang digaduhkan kepada mereka. Hal ini berbeda dengan sistem kembali anak, sapi bibit secara tidak langsung menjadi milik RTP penggaduh menyebabkan rendahnya motivasi untuk memperoleh anak sapi yang pada umur tertentu akan diserahkan untuk didistribusikan kepada peternak lainnya. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa pada sistem kembali anak, cepat atau lambat penarikan menurut asumsi RTP tidak akan mempengaruhi peluang untuk memiliki ternak sapi yang digaduhkan.



Gambar 1.

Ringkasan Hasil Estimasi

Dominasi faktor sistem guliran ini menyebabkan variabel umur dan jumlah ternak sapi bibit yang diterima oleh RTP penggaduh tidak berpengaruh signifikan terhadap kecepatan pengembalian awal. Berdasarkan arah hubungan kedua variabel maka semakin tinggi umur sapi bibit dan banyak jumlah ternak sapi bibit yang diterima maka akan semakin cepat pengembalian pertama. Berdasarkan arah hubungan antara ketiga variabel dapat diambil kesimpulan sementara bahwa sistem guliran induk (grati) memiliki

kemampuan yang lebih baik untuk mendorong peningkatan produktivitas ternak sapi bibit yang disebarkan oleh pemerintah maupun pihak lainnya.

Kecepatan pengembalian pertama secara langsung tidak signifikan mempengaruhi tingkat pelunasan oleh RTP penerima sapi gaduhan. Tingkat pelunasan secara signifikan dipengaruhi oleh faktor sistem guliran, lama gaduhan yang sudah berjalan dan jumlah ternak yang diterima. Sistem guliran 1 kembali 2 meskipun telah berlangsung lama dan bahkan lebih dari 5 tahun ternyata

sampai sekarang masih memiliki tingkat pelunasan jauh lebih rendah dibanding sistem 1 kembali 1 baik kembali induk maupun kembali anak. Pada sisi lain, jika dibanding antara sistem guliran 1 kembali 1 antara kembali induk dengan kembali anak ternyata tingkat pelunasan kembali induk lebih rendah dibanding kembali anak. Perbedaan tingkat pelunasan antara kedua sistem guliran kembali 1 ini lebih disebabkan oleh perbedaan jangka waktu gaduhan yang sudah berjalan. Lama gaduhan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pelunasan dimana semakin lama gaduhan berjalan maka semakin tinggi tingkat pelunasan ternak sapi bibit gaduhan dengan kecepatan mencapai 0,33% setiap bulan. Gaduhan sistem kembali induk baru berkembang setelah sistem kembali anak sehingga jangka waktu gaduhan relatif lebih pendek dibanding sistem guliran kembali anak.

Pada sisi lain, jumlah ternak yang diterima terkait langsung dengan jumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh RTP penerima sapi bibit, sehingga berpengaruh signifikan terhadap tingkat pelunasan. Variasi waktu kelahiran akibat perbedaan produktivitas ternak sapi bibit menyebabkan setiap sapi bibit dalam RTP yang sama akan memiliki waktu menghasilkan anak sapi yang berbeda. Berdasarkan hasil estimasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pelunasan, maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa sistem guliran 1 kembali 1 baik dalam bentuk kembali anak maupun induk akan lebih cepat lunas dibanding dengan 1 kembali 2 dan hal ini merupakan sesuatu yang wajar karena terkait dengan beban kewajiban yang harus ditanggung oleh RTP penerima ternak sapi bibit gaduhan.

Beban pengembalian aktual yang ditanggung RTP penerima sapi bibit gaduhan dapat dilihat dari tingkat bunga modal dan secara signifikan dipengaruhi oleh variabel sistem guliran

dan jangka waktu pengembalian. Pada sisi lain, tingkat pelunasan dan jumlah ternak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat bunga modal. Tingkat bunga modal ditanggung oleh RTP pada sistem guliran 1 kembali 2 lebih tinggi dibanding dengan sistem 1 kembali 1 baik kembali induk maupun kembali anak. Hal ini menjadi wajar karena Selanjutnya pada sistem 1 kembali 1, maka tingkat bunga modal yang ditanggung sistem kembali induk signifikan lebih tinggi dibanding dengan sistem kembali anak. Perbedaan signifikan antara tingkat bunga pada masing-masing sistem guliran ini mengindikasikan bahwa perbedaan perlakuan yang ada selama ini akan menyebabkan terjadinya ketidakadilan antar RTP penerima sistem guliran yang berbeda. Tingkat bunga modal sistem 1 kembali 2 yang selama ini banyak diterapkan dalam distribusi ternak sapi bibit sesuai dengan pedoman perguliran ternak sapi pemerintah sebenarnya sudah tidak layak untuk digunakan karena sangat memberatkan peternak penerima gaduhan dengan rata-rata suku bunga rata-rata mencapai 23,04%. Tingkat suku bunga ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding tingkat suku bunga investasi dan modal yang berlaku umum di lembaga keuangan seperti perbankan yang berkisar antara 10 - 14% bahkan untuk tingkat suku bunga kredit konsumsi. Untuk itu, surat edaran dirjen peternakan yang selama ini menjadi pedoman dalam distribusi ternak pemerintah sudah selayaknya harus direvisi agar tidak terlalu memberatkan beban peternak penerima gaduhan sapi pemerintah.

Lama pengembalian kewajiban oleh RTP menggunakan indikator jangka waktu pengembalian terakhir karena belum semua kewajiban RTP sudah dilunasi. Faktor lama pengembalian ini memiliki pengaruh signifikan terhadap

beban tingkat bunga yang ditanggung penerima gaduhan dengan arah berlawanan. Korelasi negatif ini mengindikasikan bahwa semakin lama jangka waktu pengembalian maka semakin rendah beban tingkat suku bunga yang ditanggung oleh penerima gaduhan. Kondisi ini menggambarkan bahwa tidak adanya insentif bagi RTP yang mengembalikan lebih cepat karena beban bunga yang mereka tanggung lebih besar, dan kondisi ini diduga menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya motivasi RTP untuk mempercepat pengembalian. Cepat atau lambat pengembalian yang dilakukan RTP tidak akan memberi insentif apapun kepada mereka dan bahkan beberapa proses gaduhan yang sudah melewati batas waktu kontrak (5 tahun dan belum lunas) tidak ada sanksi apapun dari pemerintah sebagai pemberi gaduhan utama termasuk menarik kembali sapi bibit yang telah digaduhkan pada RTP. Perlakuan yang sama tetapi dalam kenyataannya merupakan diskriminasi (ketidakadilan) terhadap RTP yang memiliki prestasi lebih dalam jangka panjang akan menghambat terciptanya lingkungan kondusif bagi berkembangnya motivasi RTP untuk berkompetisi. Suasana kompetisi dibutuhkan untuk memacu partisipasi RTP penerima gaduhan untuk secara sadar memacu produktivitas ternak sapi bibit yang mereka pelihara.

### **Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan**

#### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Jangka waktu penarikan pertama ternak sapi bibit atau keturunannya tidak banyak berbeda antar berbagai sistem gaduhan yang diterapkan dengan rata-rata penarikan pertama

lebih dari 30 bulan setelah sapi bibit diterima peternak serta yang tercepat adalah sistem gaduhan kembali induk (grati).

- b. Tingkat pelunasan ternak sapi bibit oleh RTP penerima gaduhan relatif masih sangat rendah dan bahkan diperkirakan akan melampaui batas waktu kontrak pelunasan yaitu 5 tahun terutama sistem 1 induk kembali 2 anak.
- c. Tingkat pelunasan disamping dipengaruhi oleh sistem gaduhan juga terkait secara signifikan dengan tingkat pengembalian pertama dan lama gaduhan yang telah berjalan.
- d. Tingkat suku bunga beban pengembalian antar sistem gaduhan berbeda signifikan dengan tingkat bunga tertinggi pada sistem gaduhan 1 induk kembali 2 yaitu 23,04%.
- e. Tingkat beban pengembalian sistem 1 kembali 2 jauh lebih tinggi dibanding suku bunga kredit modal dan investasi pada lembaga keuangan komersil ini menjadi bukti empiris perlunya revisi terhadap SK. Mentan tentang pedoman distribusi ternak sapi bibit.

#### ***Rekomendasi Kebijakan***

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan sementara yang sudah diperoleh maka dapat disampaikan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

- a. Pemerintah perlu melakukan revisi SK Mentan No. 146/Kpts/HK.050/2/93 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah agar tidak memberatkan beban hutang yang harus ditanggung oleh rumah tangga penerima sapi bibit.
- b. Perlu adanya perubahan mendasar dalam model distribusi ternak sapi

- bibit dengan lebih memprioritaskan partisipasi dan kelembagaan peternak agar pengembangan ternak sapi bibit dapat berkelanjutan.
- c. Model yang dikembangkan sebaiknya tidak hanya mampu mendorong percepatan pengembalian dan produktivitas tetapi juga mampu memberdayakan kelompok peternak.
- d. Pemberdayaan kelompok diharapkan mampu menjadi dasar bagi penguatan peran kelompok dalam berbagai program termasuk penjangkaran dini guna mencegah terjadinya pengurusan ternak sapi betina produktif.

#### Daftar Pustaka

- Frensidy B. 2006. Matematika Keuangan. Edisi 2 Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Hoyle, R. H. 1995. *Structural Equation Modeling*. SAGE Publications, Inc. Thousand Oaks, CA. This book provides a very readable, broken-down introduction to SEM. It discusses SEM in relation to AMOS software.
- Johnson, H., and G. Wilson, 1999. Institutional Sustainability as Learning, Development in Practice, Vol. 9, 41:45, Februari 1999. Carfact Publisihing Ltd, New York.
- Mulyadi, D., 2009. Banyak Sapi Produktif Lolos untuk Dipotong: PENGAWASAN DI RPH HARUS KETAT. Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
- Novra, A., Adriani, H. Syaripuddin dan N. Herlambang, 2009. Evaluasi Program Aksi Perbibitan Provinsi Jambi, Laporan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi, Jambi.
- Novra, A dan Depison, 2009. Solusi Alternatif Kelembagaan Partisipatif Program Penanganan Pengurusan Sapi Betina Produktif Provinsi Jambi, Jurnal Ilmu Peternakan ISSN: 1410-7791, Vol. XXI Ed. Agustus 2009: 1-10, Fakultas Peternakan Universitas Jambi.
- Saragih, B. dan B. Krishnamukti, 1992. Pengembangan Agribisnis Kecil, Pusat Studi Pembangunan Lembaga Penelitian Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Tim Road Map, 2007. Percepatan Swasembada Daging Sapi 2012 Menuju Surplus Produksi 2012 "Road Map Komoditas Unggulan Peternakan Provinsi Jambi", Laporan Penelitian Kerjasama Universitas Jambi dan Dinas Peternakan Provinsi Jambi, Jambi.